

IMPLEMENTASI PROGRAM “1-10-100” PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN SUKODADI

¹ Eva Nur Laily Rohmah, ² Moh. Hudi
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Correspondent author: evanurlaily@unisda.ac.id
Kabupaten Lamongan, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the 1-10-100 program of the Lamongan Regency Government in the effort to overcome stunting in Lamongan Regency. This research uses a qualitative research method by analyzing the implementation theory of George C. Edward III with four variables namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data were collected through interviews and focus group discussions. Data analysis was carried out using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research in the field, it can be concluded that the implementation of the 1-10-100 program of the Lamongan Regency Government is running well. The stunting rate in Lamongan Regency has decreased but has not been maximized.

Keywords: Policy implementation; Public Policy; Stunting Countermeasures

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program 1-10-100 Pemkab Lamongan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis teori implementasi dari George C. Edward III dengan empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengumpulan data melalui wawancara dan Focus Group Discussion. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi program 1-10-100 Pemkab Lamongan berjalan dengan baik. Angka stunting di Kabupaten Lamongan berhasil turun tetapi belum dapat maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Stunting; Kebijakan Publik

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)

Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*). Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexs of policy implementation*). (Supriadin et al., 2020)

Demikian halnya dengan masalah stunting yang merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Stunting juga menjadi salah satu penghambat pertumbuhan tinggi badan anak. Kondisi gagal tumbuh pada anak diakibatkan oleh kekuarangan gizi yang kronis sehingga pada usianya anak akan tergolong pendek. Kekurangan gizi tersebut terjadi sejak bayi masih berada dalam kandungan dan pada masa awal bayi setelah dilahirkan. Namun, kondisi stunting baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Penyebab stunting merupakan faktor multi dimensi. Penyebabnya tidak hanya karena gizi buruk yg dialami anak balita atau ibu ketika hamil. Adapun beberapa faktor yg menjadi penyebab stunting adalah sebagai berikut: (1.) Asupan energi yang kurang, (2) Berat badan lahir, (3) Tingkat Pendidikan ibu, (4) Tingkat pendapatan keluarga, (5) Pola asuh dan keberagaman pangan.

Pertumbuhan pada anak dapat dilihat berdasarkan indikator status gizi. Terdapat 3 indikator dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bayi dan anak, yaitu (1) indikator berat badan menurut umur (BB/U), (2) tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis. Hal ini dilihat melalui indikator TB/U dengan nilai skor-Z (Z- score) di bawah minus 2.

Stunting menimbulkan dampak jangka Panjang pada individu dan masyarakat yakni berkurang kognitif dan perkembangan fisik, dapat mengurangi produktif kapasitas dan menimbulkan kesehatan yang buruk, dan berpotensi meningkatkan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Anak sebelum usia 2 tahun yang mengalami stunting dapat mengakibatkan rendahnya kognitif dan prestasi belajar Ketika anak masuk usia sekolah dan remaja. Jika permasalahan stunting tidak segera ditangani, maka tahun 2025 diperkirakan akan terdapat 125 juta balita yang mengalami stunting (WHO, 2014). Beberapa kajian menunjukkan stunting berakibat pada penurunan prestasi akademik anak (Picauly & Toy, 2013), meningkatkan risiko obesitas (Hoffman et al, 2000; Timaeus, 2012) rentan terhadap penyakit tidak menular dan peningkatan risiko penyakit degeneratif (Picauly & Toy, 2013).

Tingginya angka prevalensi stunting dapat menjadi indikator kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu prevalensi *stunting suatu daerah* merupakan cerminan buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa (UNICEF, 2013).

Kasus stunting di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada 2022 (3), prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di posisi pertama dengan angka balita stunting sebesar 35,3%. Peringkat ke dua ditempati Sulawesi Barat dengan angka prevalensi stunting 35%. Terdapat 18 provinsi dengan angka prevalensi stunting di atas angka rata-rata nasional. Angka prevalensi Jawa Timur sebanyak 19,2% walaupun di bawah rata-rata nasional namun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu stunting dan berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai program dan intervensi, yang telah terintegrasi dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas). Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Pencegahan Stunting pada Masa Pra-Kehamilan dan Kehamilan
- 2) Peningkatan Kualitas Asupan Gizi dan Mikronutrien
- 3) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
- 4) Penguatan Peran Keluarga, Masyarakat, dan Desa
- 5) Penguatan Sistem dan Kapasitas Pendukung

Berdasarkan Survei Status Gizi Balita (SSGB) 2023 yang diterbitkan oleh BKKBN dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting di Jawa Timur berada pada angka 24,4%. Angka ini mencerminkan proporsi balita yang mengalami stunting dari total balita yang diukur. Angka stunting di Jawa Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, mencerminkan perbedaan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan serta kondisi sosial ekonomi. Peningkatan angka stunting di Jawa Timur mencerminkan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai sektor mulai kesehatan, sosial, ekonomi, hingga sektor lingkungan.

Kabupaten Lamongan juga menjadi Kabupaten yang mengalami peningkatan angka stunting. Angka stunting di Lamongan pada tahun 2022 berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) sejumlah 27,5 (4), sehingga mulai tahun 2023 hingga hari ini Pemkab Lamongan serius untuk menekan angka Stunting dengan menjalankan beberapa program yang diantaranya adalah program "1-10-100" yang mana dijalankan mulai dari pemerintah

level desa. Program inovasi 1-10-100 merupakan program yang digagas oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan dengan memberikan 1 paket dari orang tua asuh untuk 10 anak stunting selama 100 hari. Kecamatan Sukodadi merupakan salah satu wilayah yang beberapa desanya menjadi lokus stunting. Hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan kajian pada program "1-10-100" Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya penanggulangan stunting. Namun di sisi lain, Pemkab Lamongan dianggap belum optimal dalam menjalankan pada program lain yang juga bertujuan untuk menangani bayi stunting. Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun dua rumusan penelitian: *pertama*, bagaimana implementasi program "1-10-100" di Kecamatan Sukodadi? *Kedua*, faktor apa yang menghambat dan mendukung jalannya program tersebut? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis terkait implementasi program "1-10-100" pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Lamongan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur penelitian dilakukan dengan: (1). Pengambilan data yakni dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Melaksanakan Observasi dan wawancara mendalam kepada pihak kecamatan, kepala desa beserta jajaran yang berwenang, kader posyandu dan stakeholder terkait. Tujuan dalam pengambilan data ini untuk memperkuat informasi awal pada objek formal dan objek material penelitian. Tahapan akhir dari pengambilan data adalah dengan Forum Group Discussion (FGD); (2). Klasifikasi data yaitu dilakukan pemilahan data primer dan sekunder untuk memperoleh data yang representatif dan bermutu tinggi; (3). Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis data primer dengan dibantu data sekunder untuk memperoleh sintesis data secara sistematis, kritis dan reflektif; (4). Interpretasi data dilakukan dengan memberikan pemaknaan dan evaluasi kritis untuk mendapatkan suatu pandangan yang berimbang, objektif dan mendalam tentang implementasi kebijakan "1-10-100"; (5). Penulisan hasil analisis dan interpretasi yakni dengan menuliskan hasil analisis dan interpretasi data secara teratur, sistematis-reflektif dan proporsional. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif menurut Miles, Huberman & Saldaña dalam (Elwan et al., 2022) dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Implementasi Program “1-10-100” Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting pada Faktor Komunikasi

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian tindakan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Ini mencakup organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh kepala dinas atau sebutan lainnya. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Hal ini sesuai pendapat Dwiyanto (2006:56) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendiri-sendiri pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019).

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (content of policy); dan lingkungan implementasi (context of implementation). Berhasil tidaknya suatu kebijakan ditentukan pada tataran implementasi kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap

permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).

Demikian juga pada implementasi program 1-10-100 pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Sukodadi. Informasi terkait program 1-10-100 Pemkab Lamongan telah disosialisasikan dengan baik oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lamongan dengan melibatkan para bidan, tenaga kesehatan dan kader posyandu desa. Desa Banjarrejo Kecamatan Sukodadi menjadi salah satu desa yang menjadi pilot project dari pelaksanaan program ini di tahun 2023. Dalam kurunwaktu tiga bulan uji coba pelaksanaan kegiatan ini di Desa Banjarrejo Kecamatan Sukodadi, program ini menunjukkan hasil positif yakni turunnya jumlah balita stunting yang mana sebelum penerapan uji coba pelaksanaan terdapat 26 balita stunting, setelah diterapkannya kegiatan ini terdapat 15 balita yang dinyatakan lolos dari stunting.

Gambar 1. Desa Banjarrejo Pilot Project 1-10-100



Sumber: <https://tabloidsuksesinasional.com>

Selain itu, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan juga melakukan sosialisasi khusus terkait pelaksanaan program 1-10-100 Pemkab Lamongan dengan melakukan launching di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan bertepatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia yakni pada tahun 2023.

Analisis Implementasi Program “1-10-100” Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting pada Faktor Sumberdaya

Menurut George C. Edward III sumberdaya menjadi salah satu variable yang dapat menentukan keberhasilan dari proses implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Pada program 1-

10-100 Pemkab Lamongan ini diluncurkan oleh Pemkab Lamongan dengan TP PKK Lamongan dengan menggandeng bidan desa, tenaga Kesehatan dan kader posyandu desa. Program 1-10-100 dalam Upaya penanggulangan stunting di Lamongan memberikan 1 (satu) paket bantuan untuk 10 (sepuluh) balita selama 100 (seratus) hari yang diberikan makanan bergizi sesuai kadar dari ahli gizi. Dengan asumsi 1 kali makan membutuhkan biaya Rp. 5.000/hari, untuk 10 Balita sebesar Rp. 50.000/hari. Sehingga 1 Paket yang terdiri dari 10 anak selama 100 hari membutuhkan biaya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Per Mei 2024 telah tercatat terdapat 70 orang tua asuh untuk anak stunting yang ada di Kabupaten Lamongan. Adapun sumberdaya anggaran yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini berasal dari dana donator yang menjadi orang tua asuh untuk balita stunting. Biaya Rp.5.000/hari untuk satu anak stunting setiap harinya masih terbilang minim, sehingga di awal pelaksanaan program 1-10-100 bagi kader posyandu desa lokus stunting mengalami kesulitan dalam menentukan menu makanan.

Analisis Implementasi Implementasi Program “1-10-100” Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Faktor Disposisi

Faktor disposisi dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan stunting merujuk pada sikap, nilai, dan motivasi individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program 1-10-100 penanganan stunting di Kabupaten Lamongan adalah TP PKK Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan hingga kader posyandu yang ada pada tingkat desa. Pada dasarnya kebijakan ini telah berjalan bagaimana mestinya. Bahkan inisiatif dan antusiasme kader posyandu pada tingkat desa sangat tinggi dalam upaya penanganan kasus balita stunting yang ada di desa mereka. Bahkan kader posyandu mengantarkan paket makanan yang diberikan kepada balita stunting hingga memastikan paket makanan tersebut telah dimakan oleh balita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan program 1-10-100 Pemkab Lamongan. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan monitoring kegiatan penyaluran untuk dapat berjalan optimal. Karena di setiap bulan timbangan akan dilakukan evaluasi terkait pencapaian target penurunan angka balita stunting yang ada di desa yang menjadi lokus stunting khususnya.

Analisis Implementasi Implementasi Program “1-10-100” Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Faktor Struktur Birokrasi

Implementasi program 1-10-100 Pemkab Lamongan dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Lamongan mulai dari Tingkat Kabupaten hingga Tingkat desa dengan berkoordinasi dengan bidan desa, tenaga Kesehatan dan kader posyandu. Desa. Dengan pembiayaan dari donator yakni orang tua asuh. Orang tua asuh untuk balita stunting ditentukan oleh TP PKK Lamongan sehingga pihak desa hanya bertugas membelanjakan atau memasak untuk

paket makanan yang akan diberikan pada balita stunting di desa lokus stunting yang ada di Kecamatan Sukodadi. Setelah pelaksanaan pilot project di Desa Banjarrejo, untuk Kecamatan Sukodadi di tahap 1 pelaksanaan program 1-10-100 terdapat enam desa yang menjadi desa target pelaksanaan program tersebut. Adapun desa-desa tersebut yakni Desa Sukodadi, Plumpang, Kadungrebug, Menongo, Madulegi dan Kebonsari. Untuk tahap 2 hanya terdapat satu desa yakni desa Sidogembul dan tahap 3 terdapat tiga desa yakni Gedangan, Balungtawun dan Baturono. Pelaksanaan program ini dijalankan oleh pihak pelaksana dengan baik dan angka stunting pun berkurang namun hasil yang diperoleh belum bisa dikatakan maksimal karena dengan pembiayaan yang masih minim.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program 1-10-100 Pemkab Lamongan secara umum telah berjalan dengan baik, dan masyarakat juga menyambut juga antusias dalam ikut serta berupaya menanggulangi stunting yang ada di Kabupaten Lamongan khususnya pada kecamatan Sukodadi. Namun dengan pembiayaan yang masih minim, membuat hasil belum maksimal karena perlu tambahan gizi yang cukup untuk dapat menekan angka stunting yang ada di Desa-Desa. Disarankan agar untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengkaji program ini dengan teori analisis kebijakan publik yang lain yakni dengan teori evaluasi untuk dapat melihat efektivitas dan dampak pada program tersebut bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani dan Darmawi. (2022). "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya" *Jurnal Biology Education*. 2022 10
- Irwan, Lalu NAS. (2020). "Pemberian Pmt Modifikasi Berbasis Kearifan Lokal Pada Balita Stunting Dan Gizi Kurang." *JPKM*. 2020 1(1)
- KemenkeS RI. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*
- Kumanireng HYNL, Triputro RW. (2021). *Gerobak Cinta: Model Pencegahan Stunting di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur*. *JIRReG: Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. 5(2)
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). *MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi*. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lamawuran YD, Tokan FB, Ratumakin PAKL. (2023). "Tradisi Bu'a Oring: Alternatif Penanganan Stunting Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Flores Timur ". *Jurnal Agregasi : Jurnal (8) Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*.
- Muhammad Elwan, L. O. (2019). *PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA*. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223>

Nada Q, Rosdiana W. (2023). "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Lamongan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*". 1(2)

Nugroho MR, Sasongko RN, Kristiawan M. 2021. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 5 (2)

Rahmawati AF, Husodo BT, Handayani N. (2021). The Analysis Of Lamongan Toddler Nutrition Care (PELITA LA) Program in Dradah Health Center Lamongan. *Journal Of Public Health For Tropical And Coastal Region*. 4(1)

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>